



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
UNIT KERJA : KECAMATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : EKO JOKO ISWANTO
2. Jabatan : CAMAT
3. NHK : 411545

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 456.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 434 m²/144 m² di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 52.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 6232 m²/400 m² di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. Tanah Seluas 3200 m² di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
4. Tanah Seluas 603 m² di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 54.000.000
5. Tanah Seluas 1188 m² di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 147.000.000
6. Tanah Seluas 2388 m² di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 33.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 282.000.000

1. MOTOR, HONDA CB 15 AIRF Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000
2. MOTOR, SUZUKI FD 125 Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000
3. MOTOR, KAWASAKI LX 150 H Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 22.000.000
4. MOBIL, TOYOTA HARTOP Tahun 1979, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
5. MOBIL, TOYOTA RUSH Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000



6. MOTOR, HONDA NF 125 Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp.
3.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERTAGIH	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	20.520.236
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	758.520.236
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	758.520.236

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.